



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG NON DIAGNOSTIK
3. NHK : 624362

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 549.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/21 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 564 m2/250 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/130 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 139.500.000
4. Tanah Seluas 114 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
5. Tanah Seluas 287 m2 di KEBUMEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 59.000.000
6. Tanah Seluas 432 m2 di KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 73.000.000
7. Tanah Seluas 1035 m2 di KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 35.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 89.600.000**

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.950.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 1.650.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 578.512.196

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.229.712.196

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.229.712.196

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.